|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian  | : | Media Palu | KasubaudSulteng II |
| Hari, tanggal | : | Selasa, 4 November 2014 |
| Keterangan | : |  |
| Entitas | : | Bangkep |

Kasi Pidsus Bantah Beri Komentar Di Media

* Tuesday, November 4, 2014, 17:51

**Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bangkep, Dody Silalahi, SH. MH membantah memberikan komentarnya kepada media lokal di Luwuk, mengenai status perkara SPPD fiktif DPRD Bangkep yang kini tengah ditangani pihaknya.**
Dody mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah memberikan pernytataan seperti yang dilansir oleh salah satu media lokal di Luwuk, maupun yang telah diberitakan Mediapalu.com.

“ Saya tidak pernah memberikan pernyataan terkait kasus yang di maksud. Saya minta, pemberitaan tentang diri saya di media agar diklarifikasi., “ pinta Dody kepada wartawan.

Mencuatnya masalah itu, berawal saat ketua LSM Merah Putih, Habib Muhammad membaca pemberitaan yang dilansir salah satu media lokal tentang kasus SPPD fiktif yang sudah ditetapkan tersangkanya.

Habib Muhamad mempertanyakan kepada Kajati bahwa Kasi Pidsus Kajari Bangkep sudah mengeluarkan pernyataan soal status penanganannya, tetapi ketika dikonfirmasi Kasi Pidsus sama sekali belum mengeluarkanpernyataan apapun.

Habib Muhammad berasumsi bahwa pemberitaan yang dilansir oleh sebuah Koran lokal di Luwuk pada edisi 24 Maret itu, menganggap bahwa Dody sudah mengeluarkan statemennya terkait soal kasus SPPD fiktif di lembaga DPRD Bangkep.

Kabar tersebut kembali beredar seakan Dody Silalahi sudah mengeluarkan pernyataannya. ketika menghubungi pihak media on line dan cetak yang menulis berita soal dirinya, Dody keberatan dan mengaku dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan apapun soal kasus SPPD fiktif, sehingga Dody meminta agar pemberitaan tentang dirinya di media perlu diklarifikasi.

Kajati Sulteng ketika dimintai komentarnya oleh LSM Merah Putih terkait soal peryataan dari pihak Kajari melalui kasi Pidsusnya Dody Silalahi SH MH, Kajati justru mempertanyakan apakah benar Dody mengeluarkan pernyataannya seperti yang dituturkan oleh LSM Merah Putih.

LSM Merah Putih ketika itu tidak memperlihatkan bukti pernyataannya Dody seperti yang dilansir oleh media lokal, namun Kajati menjelaskan jika benar Dody mengeluarkan pernyataan tanpa berkoordinasi dengan pimpinannya yakni Kajari, maka dinilai melanggar etika profesi.

Kajati berharap asumsi yang dikemukakan oleh LSM Merah Putih tidak menimbulkan fitnah di lembaga kejaksaan.

Kajari Bangkep yang dikonfirmasi pada Rabu malam (29/10) pukul 21.00 via telepon genggam soal pernyataan Dody, ia mengatakan bahwa Kasi Pidsus itu tidak pernah mengeluarkan pernyataannya apapun soal kasus SPPD fiktif, karena harus berkoordinasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan, sesuai etika profesi. Ujar Kajari, sementara menurut Dody Keterangan yang akan berikan oleh pihak kejaksaan terkait dugaan SPPD fiktif tentu harus melalui prosedur berdasarkan suratperintah.

Menurut Habib Muhammad bahwa pemberitaan soal kasus SPPD fiktif terlanjur memberikan angin segar kepada masyarakat Banggai Kepulauan, karena para pelaku tindak korupsi akan segera ditindaki, namun Habib Muhammad menilai penanganan kasus tersebut terkesan lamban, sehingga mendesak pihak kejaksaan tinggi segera menyikapinya.
Menyikapi hal tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng Juhanis Tanak SH. H.Hum, menyampaikan kepada pihak LSM untuk bersabar, karena kasus tersebut sedang ditangani oleh pihak Kajari Bangkep. Namun pihak Kejati tetap akan memantau setiap perkembangan penanganannya. Dan Kejati juga meminta pihak LSM dan media agar dapat membantu pihak kejakasaan untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. **MEDIAPALU.COM**